

# PENGARUH PHBM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI BKPH NGADISONO KPH KEDU SELATAN

*Effect of PHBM on Forest Community Welfare in BKPH Ngadisono,  
KPH Kedu Selatan PERUM PERHUTANI*

Heru Salam  
Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta

## ABSTRAK

*Kerusakan hutan tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan penduduk. Untuk mengatasinya, beberapa program pengentasan kemiskinan seperti prosperity approach telah dicoba oleh Perhutani tetapi hasilnya belum memuaskan, bahkan konflik semakin luas. Oleh karena itu, Perhutani mengenalkan program baru (PHBM) yang didesain mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak. Untuk mengetahui program PHBM itu, penelitian deskriptif yang dilaksanakan secara studi kasus (case study) menghasilkan gambaran bahwa kendati masyarakat dilibatkan dalam program PHBM, ternyata pengaruhnya terhadap perbaikan kesejahteraan tidak significant. Walaupun demikian, terjadi perubahan ratio B/C negative sebelum PHBM menjadi positif setelah ada PHBM. Hal tersebut menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan walaupun sedikit (tidak significant). Karena itu, masalah kemiskinan masyarakat menjadi penting dalam kebijakan Perhutani kedepan.*

Kata kunci: PHBM,,kesejahteraan,pendapatan

## PENDAHULUAN

Sifat multifungsi hutan yang seharusnya berjalan seimbang, saat ini telah terganggu oleh pesatnya perkembangan jumlah penduduk. Fungsi ekologi sebagai fungsi yang mengatur tata air,penyimpan sumberdaya genetic, pengatur kesuburan tanah, dan sebagai penyerap karbon (*carbon sink*) menjadi terdesak oleh fungsi ekonominya. Hal yang sama juga terjadi pada fungsi sosial yaitu fungsi hutan untuk menyediakan dan meningkatkan lapangan kerja,tempat beberapa kelompok masyarakat untuk melaksanakan berbagai kebiasaan dalam memanfaatkan hutan dan hasil hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian. Saat ini, bekerjanya dua

fungsi ini semakin sulit dijumpai, sehingga kualitas hutan semakin menurun. Dampaknya adalah kualitas kehidupan manusia semakin turun (Salam, 2003).

Dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap perubahan kondisi hutan seperti yang digambarkan tersebut terjadi hampir diseluruh kawasan Perhutani. Luas pemilikan lahan yang semakin berkurang dan semakin terbatasnya lapangan kerja, mendorong banyak pihak mengalihkan perhatiannya kepada hutan sebagai alternative untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Cara memanfaatkan hutan pun juga semakin beragam bahkan cara itu sering melampaui daya dukungnya sehingga menyebabkan kondisi hutan semakin rusak. Oleh karena itu tidaklah salah apabila hal tersebut banyak dianggap sebagai pemicu munculnya konflik antara masyarakat – Perhutani. Tetapi tidak kalah pentingnya dalam konflik ini adalah peran pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan masyarakat desa hutan dalam berinteraksi dengan hutan.

Kerusakan hutan memang tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan penduduk baik berupa kemiskinan structural maupun alamiah (Nasution, 2002). Untuk mengatasi hal tersebut, Perhutani mengembangkan program-program pengentasan kemiskinan seperti program *prosperity approach* walaupun dalam perkembangannya tidak berhasil. Kegagalan tersebut mendorong Perhutani menerapkan model pengelolaan baru (PHBM) yang didesain memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak. Ciri utama yang membedakan model PHBM dengan model sebelumnya (*prosperity approach*) terletak pada kuatnya peran kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ditunjukkan dalam akte notaris. Dalam akte notaris, hak dan kewajiban masing-masing pihak diperjelas sehingga diharapkan mampu mengurangi konflik. Selain peran kelompok, sifat terbuka dari PHBM lebih baik daripada program sebelumnya (Salam, 2007). Sifat terbuka tersebut cukup menguntungkan bagi pengembangan LMDH karena kemungkinan organisasi LMDH dapat dikembangkan dan ditingkatkan menjadi organisasi sekunder masih cukup terbuka. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengembangan organisasi sekunder adalah perluasan bidang usaha bersifat vertical dapat dilakukan sehingga ada pembagian wilayah aktivitas ekonomi. Organisasi tingkat

primer cukup dengan usaha produksi berbasis produk alam, sementara organisasi sekunder mengembangkan aktivitas ekonomi lanjut untuk meningkatkan nilai tambah produk primer. Dengan demikian, peran LMDH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih cukup luas. Artinya partisipasi masyarakat menjadi penting. Untuk meningkatkan hal itu, efektifitas program partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan lebih diutamakan daripada hanya sekedar menilai keikutsertaan (Micahel *et al.*, 2000). Cara pandang inilah yang harus didorong dalam pengelolaan sumberdaya hutan agar kebersamaan dapat dilestarikan (Salam, 2002).

## **BAHAN DAN METODE**

### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Aktifitas penelitian dilakukan di BKPH Ngadisono Kph Kedu Selatan selama 3 bulan. Pertimbangan memilih tempat tersebut adalah karena bagi hasil PHBM belum signifikan seperti di KPH Cepu, sehingga masyarakat masih perlu melakukan usaha lain di pertanian dan sejenisnya.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian deskriptif dipilih untuk mengkaji kasus ini karena memerlukan gambaran/deskripsi berdasarkan fakta, sifat sifat kasus saat ini, serta hubungannya dengan fenomena pendukungnya sehingga dapat memberikan informasi yang jelas. (Nazir, 1988; Arikunto, 1990). Responden dari anggota LMDH diambil secara *purposive sampling* dengan pertimbangan untuk memperoleh fakta dan karakteristik kasus diperlukan responden yang terlibat langsung dengan kegiatan PHBM dan mampu berkomunikasi.

1. Data yang diperlukan untuk menjelaskan kesejahteraan adalah:
  - a. Kesejahteraan Tingkat I : pangan belum cukup/terpenuhi. Non pangan belum terpenuhi
  - b. Kesejahteraan Tingkat II : pangan cukup terpenuhi, non pangan belum
  - c. Kesejahteraan Tingkat III: pangan dan non pangan cukup terpenuhi, tapi belum ada tabungan

2. Data biaya yang terdiri dari biaya proses produksi usaha diluar PHBM dan dalam PHBM dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal
3. Data produksi, harga, dan pendapatan.

### C. Analisis

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan B-C ratio untuk mengetahui kemampuan benefit (B) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat(C) anggota LMDH. Model matematisnya adalah:  $B-C = \text{Gros B/C ratio}$ . Yang dihitung adalah biaya modal(investasi permulaan) dan biaya operasi dan pemeliharaan sebagaigross cost. Nilai total produksi dan *salvage value* investasi (kalau ada). Kadariah (1986) menuliskan rumus umum ratio B/C adalah :

$$\text{Rumus umum : } \frac{\text{PV gross benefit}}{\text{PV gross costs}}$$

Rumus tersebut masih dirinci lebih lanjut dalam Manual Kehutanan (1992) sebagai berikut :

$$\text{PV gross benefit} = \boxed{\phantom{\text{PV gross benefit}}} \quad (\text{Anonym, 1992})$$

$$\text{PV gross cost} = \boxed{\phantom{\text{PV gross cost}}}$$

Kalau hasil dari Gros B/C ratio > 1, hasil bagi PHBM dapat meningkatkan kesejahteraan anggota LMDH. Oleh karena itu, perhitungan Gross B/C ratio harus dimulai dari aktivitas sebelum/diluar PHBM (Benefit dari usaha pertanian dan sejenisnya) kemudian dilanjutkan dengan menghitung Gross B/C ratio hasil PHBM + Gross B/C ratio diluar PHBM. Apabila nilai rasionya mengalami peningkatan sejak dari usaha diluar PHBM sampai dengan setelah ada usaha PHBM, maka PHBM memiliki peran dalam mencukupi kebutuhan masyarakat anggota LMDH.

## HASIL DAN ANALISIS

### A. Analisis Usaha Tani

Dari hasil kompilasi data dan informasi pelaksanaan PHBM, dapat dilakukan analisis untuk mengetahui distribusi biaya usahatani dan pendapatan ketika PHBM sebelum dilakukan dan sesudahnya. Karena pada akhirnya nilai inflasi sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa hutan untuk menyisihkan pendapatannya, maka dalam perhitungannya, bunga bank digunakan pula dalam penentuan nilainya.

**Tabel 1. Distribusi biaya dan pendapatan sebelum dan sesudah PHBM**

Komponen	Biaya (Rp)	Df 10%	Biaya PV (Rp)	Pendapatan (Rp)	Df 10%	Pendapatan PV. (Rp)
<b>Tenaga Kerja</b>		<b>0.893</b>			<b>0.893</b>	
Penanaman	60.000		53.580	-		-
Pemeliharaan	60.000		53.580	-		-
Panen	30.000		26.790	1.200.000		<b>1.071.600</b>
<b>Sarpras</b>						
Benih	140.000		125.000	-		-
Pupuk	45.000		40.185	-		-
Pengerjaan tanah	30.000		26.790	-		-
<b>Pengeluaran lain</b>						
Sekolah (3 anak)	180.000		170.740	-		-
Listrik	165.000		147.345	-		-
Kayu bakar	175.000		156.275	-		-
Konsumsi	120.000		107.600	-		-
Gula	120.000		107.600	-		-
<b>PHBM</b>						
Bibit Ketela pohon			25.500	44.000		39.295
Tenaga			60.000			
Jumlah			<b>1.099.480</b>			<b>1.110.895</b>

Tabel 1 memberikan informasi bahwa walaupun pendapatan meningkat (sedikit) setelah mengikuti PHBM, tetapi beban biaya tetap bertambah sehingga peningkatan pendapatan tersebut tidak memiliki arti yang significant untuk meningkatkan pendapatan.

## **B. Ratio Benefit dan Cost**

Berdasarkan data yang tersusun dalam tabel 1, dapat diketahui bahwa peningkatan pendapatan tidak terlalu significant sehingga dapat dipastikan PHBM tidak berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya (melakukan aktivitas tabungan). Untuk memperjelas peningkatan pendapatan tersebut, Ratio B/C dipilih untuk menggambarkan perbandingan pendapatan dan biaya kebutuhan hidup yang hasilnya : B/C ratio sebelum PHBM :  $1.071.600 / 1.099.480 = < 1$ . Angka  $< 1$  ini dapat dipakai untuk menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak mungkin menabung. Berbeda dengan B/C ratio sesudah PHBM :  $1.110.895 / 1.099.480 = > 1.07$ , yang menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima setelah PHBM memang lebih tinggi dari kebutuhan hidup, tetapi selisihnya cukup kecil sehingga tidak dapat diandalkan untuk menabung juga.

## **C. PHBM ke depan**

Sebagai landasan operasional, prinsip-prinsip PHBM memuat beberapa acuan yang dapat digunakan sebagai dasar menyusun kegiatan kegiatan yang memiliki potensi ekonomi baik bagi Perhutani maupun Masyarakat Desa Hutan. Bahkan tidak hanya dari aspek ekonomi, aspek lingkungan dan social pun dapat dibenahi apabila PHBM dilakukan dengan benar sehingga kepentingan golongan dalam kerja bersama ini dapat dihindari.

Tabel 2. Ruang Lingkup Prinsip-prinsip Dasar PHBM

No	Prinsip Dasar PHBM	Deskripsi
1	Keadilan dan Demokrasi	Ada nilai berbagi setiap hasil scr proporsional
2	Keterbukaan	Ada tindak lanjut hasil komunikasi, saling mendukung,memperkuat dan menguntungkan
3	Pembelajaran bersama	Saling mengisi dalam perbedaan pengetahuan dan pengalaman
4	Kejelasan hak dan kewajiban	Adanya transparansi, kepastian dan kesesuaian lahan
5	Kerjasama kelembagaan	Saling mengisi kelemahan dengan kelebihan masing-masing
6	Perencanaan partisipatif	Menyusun perencanaan dg mengembangkan peran aktif
7	Kesederhanaansistem dan prosedur	Jml lembaga terlibat dan panjang pendeknya alur prosedur
8	Perusahaan sbg fasilitator	Keterbukaan, responsive dan kemampuan perusahaan dalam memotivasi
9	Kesesuaian pengelolaan dg karakteristik wilayah	Menyusun program/kegiatan berdasarkan potensi spesifik baik dari aspek social, fisik, budaya, teknologi

Dalam Tabel 2 dapat dipelajari beberapa aspek yang cukup lengkap untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan. Karena itu kalau prinsip prinsip ini dipatuhi,maka tingkat kesejahteraan akan tercapai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Program PHBM di BKPH Ngadisono walaupun meningkatkan jumlah pendapatan total, ternyata belum mampu menjadikan Masyarakat Desa Hutan sejahtera karena kemampuan menabung/menyisihkan sebagian dari pendapatannya masih rendah. Bahkan sebagian besar sisa pendapatan yang sangat kecil tersebut, digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang dikategorikan sebagai kebutuhan diluar rencana.

Kecilnya hasil bagi PHBM menjadi pertimbangan bagi pengurus dan anggota LMDH untuk memutuskan tidak mendistribusikan tunai kepada anggota Masyarakat Desa Hutan.

#### B. Saran

Agar supaya prinsip-prinsip PHBM dapat dipatuhi dan dijadikan landasan dalam melaksanakan program PHBM, maka diharapkan Perhutani lebih meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip PHBM kepada masyarakat MDH. Dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat desa hutan dapat mengikuti alur dan prosedur pelaksanaan PHBM

### DAFTAR PUSTAKA

- Perum Perhutani. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Jakarta, April 2001
- Arikunto, S. 1990. Manajemen Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta
- Iskandar, U. 2001. Kewhutan Menapak Otonomi Daerah. Jogjakrta, Debut Press
- Mitchell, B., B.Setiawan.,Dwita Hadi Rahmi. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Jogjakatrta. Gadjah Mada University
- Nasuion. L.I. 1996. Taksonomi Kemiskinan di Indonesia Suatu Kajian Eksploratif. Dalam: M.T. Felix Sitorus, Agus Supriono, Titik Sumarti dan Gunardi ( Eds). Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. Prof Dr Sayogyo 70 Tahun. Jakarta, Grasindo
- Salam. H. 2002. Identifikasi Masalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kasus di RPH Tangen Kabupaten Sragen. Penelitian Dosen Muda. Fakultas Kehutanan Instiper Jogjakarta